LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

BIDANG PEMERINTAHAN

TAHUN 2023



.

 RENCANA KERJA

KECAMATAN MATESIH

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

2022

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.

|  |
| --- |
| Matesih, 2022CAMAT MATESIHWARDOYO. SH, MMPembina Tk INIP. 196611261998031004 |

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu

 dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Matesih 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 28

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Prioritas dan Plafon anggaran sementara 41

BAB V PENUTUP

5.1 Penutup 47

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Kecamatan Matesih berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

* 1. **Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
23. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129).
	1. **Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini antara lain:

* Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
* Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
* Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.
	1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Matesih disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Matesih, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

* 1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

* 1. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Matesih.

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Matesih, serta susunan garis besar isi dokumen

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN**

 **MATESIH TAHUN 2022**

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Matesih tahun lalu (2022).

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih
	2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih
	3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih
	4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih

Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN**

**MATESIH**

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2022**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun**

**Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Matesih berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan realisasi APBD Kecamatan Matesih.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Matesih untuk Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.268.664.000,- *(Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.147.534.500,- *(Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)*, dan belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 121.129.500,- *(Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)*.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih dan Pencapaian Renstra

Kecamatan Matesih s/d Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020** | **Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)** | **Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2022 semester 1** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan** |
| **Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10** | **11=(10/4)** |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **70** |  | **100** | **97,23** | **-** |  | **71,64** | **70,82** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah |  |  | **-** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
|   | **Administrasi Keuangan Perangkat daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** |  |  |  | **96,7** | **96,7** | **48** | **75** |  |
|   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |  |   | **-** | 96,7 | **96,7** | **48** | **75** |  |
|   | **Administrasi Umum** | **Tersedianya Administrasi Kantor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |  |   | **-** | 100 | 100 | 17 | **83** |  |
|   | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |   | **-** | 100 | 100 | 54 | **79** |  |
|   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor |  |   | **-** | 100 | 100 | 92 | **92** |  |
|   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |  |   | **-** | 98 | 98 | 50 | **62** |  |
|   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan |  |   | **-** | 100 | 100 | 50 | **90** |  |
|   | Penyediaan Bahan / Material | Tersedianya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan |  |   | **-** | 100 | 100 | 53 | **73** |  |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya makan dan minuman rapat serta pembiayaan konsultasi SKPD |  |   | **-** | 100 | 100 | 39 | **65** |  |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
|  | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel Kantor |  |  |  | - |   |   |  |   |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  | 100 | 100 | 100 | **100** |   |
|   | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  | **95,16** | **95,16** | **33** | **62,5** |  |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |   |   |   | 70 | 70 | 42 | 58 |   |
|   | Penyeiaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kurir |   |   |   | - | - | - | **0** |   |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |   |   |   | 100 | 100 | 42 | 67 |   |
|   | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  | **98,92** | **98,92** | **41** | **29,5** |  |
|   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |   |   |   | 99 | 99 | 3 | 4 |   |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |   |   | 97 | 97 | 41 | 55 |   |
|   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indek Kepuasan Masyarakat** | **75** |  | **72** | **100** | **100** | **100** | **100** | 87,5 |
|   | **Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** |   |   |   | 99,99 | 99,99 | 100 | **100** |   |
|   | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat, Terlaksananya kegiatan legalisasi |   |   |   | 99,99 | 99,99 | 100 | 100 |   |
|   | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF** | **100** |  | **85** | **98,68** | **98,68** | **100** | **100** | **100** |
|   | **Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa** | **Persentase kehadiran musrenbang** |  |  |  | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
|   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |   |   |   | 99 | 99 | 100 | **100** |   |
|   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |   |   |   | - |   | - | **0** |   |
|   | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Persentase lembaga kemasyarakatan aktif** |  |  |  | **100** | **100** | **53** | **100** |  |
|   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |   |   |   | 100 | 100 | 53 | **57** |   |
|   | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF** | **100** |  | **85** | **100** | **100** | **41** | **66** | **83** |
|   | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase wilayah dalam keadaan kondusif** |  |  |  | **100** | **100** | **41** | **66** |  |
|   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ngargoyoso |   |   |   | 100 | 100 | 41 | 66 |   |
|   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **PESENTASE DESA MEMILIKI APBDES DAN RKPDES SESUAI KETENTUAN** | **100** |  | **85** | **94** | **94** | **0** | **89** | **94,5** |
|   | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKPDes sesuai Ketentuan** |  |  |  | **94** | **94** | **0** | **89** |  |
|   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI | Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI |   |   |   | 88 | 88 | 0 | 89 |   |
| 0 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya |   |   |   | 100 | 100 | 0 | **0** |   |
|   | Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Terpenuhinya Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |   |   |   | - |   | 0 | **0** |   |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE WILAYAH TERTIB DESA** | **100** |  | **85** | **100** | **100** | **22** | **33** | **66,5** |
|   | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase Wilayah Tertib Desa** |  |  |  | **100** | **100** | **22** | 33 |  |
|   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa |   |   |   | 100 | 100 | 22 | 33 |   |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih**

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matesih dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

* Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
* Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
* Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
* Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
* Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
* Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
* Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
* Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
* Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
* Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Matesih meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

* Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
* Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
* Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
* Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
* Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
* Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
* Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
* Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

* Masih cukup banyak penduduk miskin
* Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
* Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
* Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
* Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan
1. Lingkungan Eksternal

Peluang:

* Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
* Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
* Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
* Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
* Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
* Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
* Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
* Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

* Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
* Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
* Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
* Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
* Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
* Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

Kabupaten Karanganyar

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis |
| Th 2020 | Th 2021 | Th 2023 | Th 2023 | Th 2020 | Th 2021 | Th 2023 | Th 2023 |
| 1 | Tujuan:Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan |  | Nilai SAKIP | 69,69 | 67 | 69 | 70 | 69,69 | 67 | 69 | 70 |  |
| 2 | Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan |  | IKM | 83,571 | 72 | 74 | 75 | 84 | 83 | 74 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Karanganyar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Karanganyar;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
4. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. **Seksi Tata Pemerintahan**
7. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
9. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
10. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
11. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
13. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
14. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
15. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
16. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
18. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
19. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
20. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
21. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
22. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
23. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
24. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
25. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
26. Masih tingginya tingkat pengangguran;
27. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Matesih yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**

**Sasaran Kecamatan Matesih**

| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Permasalahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan | * 1. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
	2. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;
	3. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur
	4. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
	5. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
	6. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
	7. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan;
	8. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;
	9. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan
 | **Seksi Tata Pemerintahan**1. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. masih rendahnya disiplin aparatur desa;
3. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
4. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
5. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,

**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**1. belum optimalnya sosialisasi Perda;
2. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
3. belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
4. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
5. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
2. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
4. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

**Seksi Kesejahteraan Sosial**1. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial:
2. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin.
3. masih tingginya tingkat pengangguran;
4. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa.
 |
| 2 | Wabah Pendemi COVID-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19 | * 1. *Corona Diseases* adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya
 | 1. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan Covid sejak awal Maret 2020
2. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan Covid-19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.
3. Salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
 |

* 1. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Matesih berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Matesih.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai prodses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.dapat dijelaskan pada tabel T-C 31

**Tabel 2.4**

**Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023**

**Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar**

Nama Perangkat daerah Kecamatan Matesih

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan |  |
| Program / kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **1** | ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah** | **100** | **2.687.872.110** | ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah** | **100** | **2.612.924.000** |  |
|  | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kec. Matesih | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 | 7.000.000 | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kec. Matesih | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 | 10.000.000 |  |
|  | administrasi keuangan | Kec. Matesih | Cakupan administrasi keuangan | 100 | 2.234.012.110 | administrasi keuangan | Kec. Matesih | Cakupan administrasi keuangan | 100 | 1.784.464.000 |  |
|  | administrasi umum perangkat daerah | Kec. Matesih | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 | 83.980.000 | administrasi umum perangkat daerah | Kec. Matesih | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 | 82.580.000 |  |
|  | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Matesih | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100.000.000 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Matesih | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 492.000.000 |  |
|  | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 |  209.880.000 | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 203.880.000 |  |
|  | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah | 100 | 53.000.000 | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah | 100 | 40.000.000 |  |
| **2** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik** | **100** | **4.000.000** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik** | **100** | **5.000.000** |  |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan | Kec. Matesih | Cakupan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 | 4.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan | Kec. Matesih | Cakupan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 | 5.000.000 |  |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **100** | **23.720.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **100** | **23.000.000** |  |
|  | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | Kec. Matesih | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | 100 | 8.720.000 | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | Kec. Matesih | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | 100 | 8.000.000 |  |
|  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec. Matesih | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 | 15.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec. Matesih | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 | 15.000.000 |  |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban** | **100** | **262.400.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban** | **100** | **264.400.000** |  |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Matesih | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 262.400.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Matesih | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 264.400.000 |  |
| **5** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **100** | **27.000.000** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **100** | **25.000.000** |  |
|  | penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kec. Matesih | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 100 | 27.000.000 | penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kec. Matesih | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 100 | 25.000.000 |  |
| **6** | ***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100** | **20.290.000** | ***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*** | **Kec. Matesih** | **Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100** | **18.020.000** |  |
|  | fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Kec. Matesih | Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | 100 | 20.290.000 | fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Kec. Matesih | Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa  | 100 | 18.020.000 |  |

* 1. **Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Matesih maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

Tahun 2023 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **BESARAN/****VOLUME** |
| 1 | **NIHIL** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |   |
| 3 |  |  |  |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

 Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Prioritas tahun 2023 adalah melanjutkan keterlanjutan capaian perencanaan 2022 dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2023 yaitu : ***“Penguatan Sinergi Pembangunan Desa dan Kota Untuk Kesejahteraan yang Merata, Inklusif, Harmoni dan Pro Lingkungan Keterlanjutan.”***

Dengan arah Kebijakan

1. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang
2. Masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif
3. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak
4. Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah
5. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul
6. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah
7. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas
	1. **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih**
	2. **Tujuan**

Tujuan merupakan perjalanan misi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Matesih yaitu ***Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.***

* 1. **Sasaran Kegiatan**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kantor Kecamatan Matesih yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Matesih yaitu ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efesien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

* 1. **Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasana Mengenai:**
		+ - 1. Faktor-factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Matesih terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

**Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

***1. Berjuang***

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata ″Berjuang″ sebagai ″berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu″, berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatakan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

***2. Bersama***

Kata ″Bersama″ dalam konteks teori *govermance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Ar­tinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kema­syarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep ″Bersama″ juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

***3. Memajukan***

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata ″Maju″ sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

1. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
2. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
3. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
4. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

***4. Karanganyar***

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

 Misi:

 Misi adalah upaya yang di lakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan.Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi.Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

 Periode 2018-2023 adalah sebagai sebagai berikut.

1. **Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

1. **Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat komplek. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

1. **Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

1. **Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

1. **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Matesih mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Matesih adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas*.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Matesih dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Matesih**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

**dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 -2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD** | **Permasalahan Pelayanan Kecamatan** | **Faktor** |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1 | **Misi:**Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga | Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan. | Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) | Motivasi serta metode kerja yang sistematik serta peningkatan SDM aparatur. |
| **Tujuan**Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik  |
| **Sasaran** Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas |

1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Matesih Tahun 2022 ada 6 Program dan 11 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

* + - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrai Keuangan
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	* + 1. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh

 Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan

* + - 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa

b). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

* + - 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

 Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan

* + - 1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a). Penyelenggaraan urusan peemrintahan umumsesuai penugasan kepala

 daerah

* + - 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

 Pemerintahan Desa

1. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baiuk jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
2. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023**

**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

**Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar**

**Nama Perangkat daerah Kecamatan Matesih**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan / Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program / Kegiatan** | **Rencana Tahun 2023** | Catatan Penting | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif** |
| **7.01** | **KECAMATAN** |  |  |  | **2.948.344.000** |  |  |  | **3.680.000.000** |
| **7.01.01** | ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*** | **Cakupan penunjang urusan pemerintah dae****rah** | **Kec. Matesih** | **100** | **2.612.924.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **3.326.000.000** |
| **7.01.01.2.01** | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kec. Matesih | 4 dokumen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **4 dokumen** | **17.000.000** |
| **7.01.01.2.02** | administrasi keuangan | Cakupan administrasi keuangan | Kec. Matesih | 12 Bulan | 1.784.464.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 Bulan** | **2.300.000.000** |
| **7.01.01.2.06** | administrasi umum perangkat daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kec. Matesih | 12 Bulan | 82.580.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 Bulan** | **102.000.000** |
| **7.01.01.2.07** | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan pengadangaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Matesih  | 12 bulan | 492.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 bulan**  | **640.000.000** |
| **7.01.01.2.08** | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | 12 Bulan | 203.880.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 Bulan** | **217.000.000** |
| **7.01.01.2.09** | pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah | Kec. Matesih | 12 Bulan | 40.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 Bulan** | **50.000.000** |
| **7.01.02** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik** | **Kec. Matesih** | **100** | **5.000.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **6.000.000** |
| **7.01.02.2.02** | PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat dartah yang ada dikecamatan | Cakupan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat dartah yang ada dikecamatan | Kec. Matesih | 2 Keg | 5.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **2 Keg** | **6.000.000** |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | Kec. Matesih | 100 | **23.000.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **26.000.000** |
| **7.01.03.2.01** | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | Kec. Matesih | 1 Keg | 8.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **1 Keg** | **9.000.000** |
| **7.01.03.2.03** | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec. Matesih | 1 Keg | 15.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **1 Keg** | **17.000.000** |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban** | Kec. Matesih | 100 | **264.400.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **270.000.000** |
| **7.01.04.2.01** | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Matesih | 12 Bulan | 264.400.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **12 Bulan** | **270.000.000** |
| **7.01.05** | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*** | **Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Kec. Matesih** | 100 | **25.000.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **30.000.000** |
| **7.01.05.2.01** | penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kec. Matesih | 4 Keg | 25.000.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **4 Keg** | **30.000.000** |
| **7.01.06** | ***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*** | **Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kec. Matesih** | **100** | **18.020.000** | **Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum** |  | **100** | **22.000.000** |
| **7.01.06.2.01** | fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Kec. Matesih | 9 Desa | 18.020.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum |  | **9 Desa** | **22.000.000** |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMTAN MATESIH**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Matesih Tahun 2023 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1)

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	* + - 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

* + - * 1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

* + - * 1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

* + - * 1. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	1. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	* + - 1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
* Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

* Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
	1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
* Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
1. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
	* + - 1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
* Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
* Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

|  |
| --- |
| **Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah** |
| **Kabupaten Karanganyar** |
| **Tahun 2023** |
| **Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih** |
| **Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih** |
| **Kode** | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Rencana Tahun 2023** | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **7** |   |   |   |   | **UNSUR KEWILAYAHAN** |
| **7** | **1** |   |   |   | **KECAMATAN** | **2,948,344,000** |   | **3,680,000,000** |
| **7** | **1** | **1** |   |   | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2,612,924,000** |   | **3,326,000,000** |
| **7** | **1** | **1** | **2.01** |   | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10,000,000** |  | **17,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 4 dokumen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 dokumen | 17,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.02** |   | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1,784,464,000** |  | **2,300,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 1 tahun | 16 Orang/bulan | 1 tahun | 1,784,464,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | 1 tahun | 2,300,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.06** |   | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **82,580,000** |  | **102,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 Paket | 12 bulan | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 9,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 Paket | 12 bulan | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 21,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 Paket | 12 bulan | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 6,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 16,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 Dokumen | 12 bulan | 1,980,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 2,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 7 | Penyediaan Bahan/Material | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 Paket | 12 bulan | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 8,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | cakupan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 35,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 40,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** |   | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **492,000,000** |  | **640,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 5 unit | 2 Unit | 2 unit | 400,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 unit | 550,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 5 unit | 5 Unit | 2 unit | 92,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 unit | 90,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** |   | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **203,880,000** |  | **217,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | tersedianya jasa penunjang daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 laporan | 12 Laporan | 12 laporan | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 laporan | 37,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | tersedianya jasa penunjang daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 laporan | 12 Laporan | 12 laporan | 173,880,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 laporan | 180,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.09** |   | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **40,000,000** |  | **50,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 5 unit | 100 % | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | 35,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 1 unit | 100 % | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | 15,000,000 |
| **7** | **1** | **2** |   |   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **5,000,000** |   | **6,000,000** |
| **7** | **1** | **2** | **2.01** |   | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **5,000,000** |  | **6,000,000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik | 12 dokumen | 6,000,000 |
| **7** | **1** | **3** |   |   | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **23,000,000** |   | **26,000,000** |
| **7** | **1** | **3** | **2.01** |   | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **8,000,000** |  | **9,000,000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | cakupan koodinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | terlaksananya forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 9 desa |  Lembaga Kemasyarakatan | 9 desa | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan koodinasi kegiatan pemberdayaan desa | 9 desa | 9,000,000 |
| **7** | **1** | **3** | **2.03** |   | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15,000,000** |  | **17,000,000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | terpenuhinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 1 lembaga | 1 lembaga | 100 % | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 lembaga | 17,000,000 |
| **7** | **1** | **4** |   |   | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **264,400,000** |   | **270,000,000** |
| **7** | **1** | **4** | **2.01** |   | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **264,400,000** |  | **270,000,000** |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | terpenuhinya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 264,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban | 12 bulan | 270,000,000 |
| **7** | **1** | **5** |   |   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **25,000,000** |   | **30,000,000** |
| **7** | **1** | **5** | **2.01** |   | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **25,000,000** |  | **30,000,000** |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 80 orang | 80 Orang | 100 % | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 80 orang | 22,000,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 4 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 80 orang | 80 Orang | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 80 orang | 8,000,000 |
| **7** | **1** | **6** |   |   | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **18,020,000** |   | **22,000,000** |
| **7** | **1** | **6** | **2.01** |   | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **18,020,000** |  | **22,000,000** |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | terpenuhinya fasilitas, rekomendasi dan koornasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desadi | Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan | 12 bulan | 12 dokumen | 100 % | 18,020,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | 12 bulan | 22,000,000 |
| **TOTAL** | **2,948,344,000** |   | **3,680,000,000** |

**BAB V**

**PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan kerja yang selaras dengan pembangungan dan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Karanganyar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud, keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja  dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Matesih dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Matesih

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Matesih. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Matesih ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Karanganyar  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

 Demikian Laporan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2023 yang telah dibuat bersama-sama untuk dapat diwujudkan bersama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pejabat | Paraf | BUPATI KARANGANYAR,TTDJULIYATMONO |